

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaharuan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari pemerintah, swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak.

Berdasarkan APBN 2016 anggaran pendapatan Negara direncanakan sebesar Rp 1.822 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah. Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a UU APBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.546 triliun.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan komponen yang penting dalam upaya memaksimalkan pendapatan Negara sektor pajak. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus atau pegawai pajak. Pelayanan fiskus juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan Negara dimana fiskus seharusnya melayani para Wajib Pajak dengan jujur, profesional dan

bertanggung jawab, tetapi faktanya para fiskus tidak semuanya bersih dan ada juga yang nakal dalam arti sering menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data yang terkait dengan SPT Wajib Pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan fiskus sangat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan akan meningkat.

Olabede (2011), melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Nigeria yang dimoderasi oleh kondisi keuangan Wajib Pajak dan preferensi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah memenuhi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka Wajib Pajak diharuskan untuk membayar pajak dan Wajib Pajak juga harus dihadapkan oleh risiko yang harus dipertimbangkan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Risiko yang dipertimbangkan antara lain risiko kesehatan, risiko sosial, risiko keuangan, risiko karir Wajib Pajak dan risiko keselamatan. Dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan, Wajib Pajak Orang

Pribadi juga harus memahami tata cara pengisian perpajakan dengan melapor, menghitung dan membayar pajak sendiri.

Terkait dengan desentralisasi, untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak, maka didirikan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan Perpajakan (KP2KP). Pendirian KP2KP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/./2012. KP2KP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP dibentuk untuk melayani daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 1.1 Laporan SPT Tahunan

Tahun	WP OP Terdaftar	Lapor SPT Tahunan WP OP	Persentase
2012	26.134	19.507	74 %
2013	29.826	20.804	69 %

Sumber : KP2KP Sungailiat, 2016

Berdasarkan data dari KP2KP Sungailiat pada tahun 2012 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sejumlah 26.134 orang, dan yang lapor SPT Tahunan sejumlah 19.507, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebesar 29.826 dan yang lapor sejumlah 20.804. Dari data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebesar 3.692 dan peningkatan pelaporan SPT Tahunan hanya sejumlah 1.297. Namun apabila data tersebut dihitung menggunakan persentase, maka terjadi penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 5%.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengkaji tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sungailiat. Peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Sungailiat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Sungailiat?
2. Apakah kondisi keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Sungailiat?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sungailiat?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk memberikan ruang lingkup agar pembatasan masalah tidak terlalu luas dan lebih fokus. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini membahas tentang persepsi kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian ini mengambil data dari KP2KP Sungailiat dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungailiat. Penelitian ini

membatasi ruang lingkup pada persepsi kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sungailiat.
2. Untuk menguji apakah kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sungailiat.
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sungailiat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak/fiskus dalam memberikan gambaran mengenai persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus.
2. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik melakukan kajian di bidang yang sama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengembangan teori mengenai perpajakan.

3. Bagi pihak pembaca dan peneliti sendiri, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai kemudahan pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang melandasi pembahasan dari masalah-masalah yang dibahas khususnya mengenai pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak, sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Setelah itu diuraikan dan digambarkan ke dalam kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel dan pengumpulan data, pengukuran variabel, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis variabel-variabel penelitian yang berhubungan sesuai dengan metode dan teknis analisis yang dipilih.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

